

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdullah, Taufiq dan Rusli Karim. *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Tiara Laksana, 1989.
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Alkostar, Artidjo, *Korupsi Politik Di Negara Modern*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Al-Mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam (Al-Ahkam Al-Sulthniyyah), Terjemah Khalifurrahman Fath & Fathurrahman*. Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Arifin, Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara* Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Asshidiqie, Jimly *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara (Teori Dan Praktek)*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Danil, Ewil, *Korupsi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Djarmika, Sastra dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Dzalil, Basiq, *Peradilan Islam*. (Jakarta: Amzah, 2012), 113.
- Hartini, Sri dan Sudrajat, Tedi, *Hukum Kepegawaian di Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.

- Hatta, Muhammad, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Aceh: Unimal Press, 2019.
- Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Ilmar, Aminudin, *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Indrayana, Denny, *Negara Ada Dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kotto, Alaididin, *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Mochtar, Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nurmawati, Made dkk, *Hukum Kelembagaan Negara*. Denpasar, 2017.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum. Cet. III*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rosikah, Chatrina Darul dan Listianingsih, Dessy Marliani, *Pendidikan Antikorupsi "Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik"*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Santoso, Bambang, *Politik Hukum*. Banten: Unpam Press, 2021.
- Siagian, Sondang P, *Filsafat administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1996.
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soedaryono, *Tata Laksana Kantor edisi 6*. Jakarta: Bumi Aksa, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Sumantri, Sri, *Lembaga dan Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Surabaya: Air Langga University, 2008.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Tayibnapis, Burhanudin A, *Administrasi Kepegawaian; Suatu Tinjauan Analitik*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Von Schmid, J. J. *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: Pembangunan, 1988.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Cet. II*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Wahyudi, Alwi. *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014.
- Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

2. Jurnal/Skripsi

- Abdillah, Muhammad Ari, Seli Harahab, dan Siti Nurani. “Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2:1 (2019): 8-13.
- Bajuri, Achmad. “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 18:1 (Maret 2011): 84-96.
- Fahmi, Mutiara, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif AlQuran” *Jurnal Petita* 2:1 (2017): 77.
- Hakiki, Muhammad Akbar, 2018. “Kedudukan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Kemala, Nadia Ambaranie. “Dalam Rancangan Revisi UU KPK, Tugas dan Wewenang KPK ditambah.”
<http://nasional.kompas.com/read/2019/09/05/13245801/dalam-rancangan-revisi-uu-kpk-tugas-dan-wewenang-kpk-ditambah>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2023

- Kurniawan, Muhammad Beni. "Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12:2 (2018): 137-150.
- Muzakki, Subairi. "Setelah Revisi UU KPK Disahkan." Detik.Com, 18 September 2019. <https://news.detik.com/kolom/d-4711432/setelah-revisi-uu-kpk-disahkan>. Diakses 20 November 2022.
- Permatasari, Adinda Dwi. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)." *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2002.
- Pratama, Jovial Falah dan Al-Fatih, Sholahuddin. "Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif", *Jurnal Komunitas Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha* 4:1 (2020): 60.
- Puguh Hariyanto, "Sejumlah Elemen Masyarakat Dukung Status Pegawai KPK Menjadi ASN". <https://nasional.sindonews.com/read/449370/13/sejumlah-elemen-masyarakat-dukung-status-pegawai-kpk-menjadi-asn-1623132379> Diakses pada tanggal 31 Mei 2023.
- Saphely, Roy. "Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia." *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 15:1 (2017): 75-87.
- Sari, Winda. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asesmen TWK Sebagai Tahapan Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.
- Wahyono, Padmo. "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan", *Forum Keadilan* 29, (April 1991).

Wasisto, Aryo dan Prayudi. “Gerakan Mahasiswa dan Upaya Mengurai Polemik Tuntutan.” *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 11:19 (Oktober 2019): 25-30.

Wulandari, Widzienty Septiani, “Analisis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasah.” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

“Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN: ‘Bagaimana mungkin ada lembaga independen, tapi pegawainya tidak independen?’.” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53740517>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2023.

3. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Risalah rapat paripurna ke-20 masa sidang II Tahun 2002-2003 Pembicaraan/ Pengambilan Keputusan Atas Rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi. No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK.

PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.